

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016), Indonesia adalah salah satu negara berkembang di Asia yang mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Dalam masa krisis tersebut, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap bertahan. Selain itu, sektor UMKM memiliki peran signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya sektor UMKM pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap bisa memulai usaha melalui penciptaan lapangan kerja baru bagi penduduk Indonesia. Dilansir dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tahun 2022 UMKM memiliki kontribusi mencapai angka 60,5% terhadap PDB dan menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja dari total penyerapan tenaga kerja secara Nasional.

Meskipun kontribusi UMKM di Indonesia sangat besar, nyatanya permasalahan UMKM di Indonesia masih sangat banyak dan mengalami keterlambatan serta penurunan pada kinerjanya. Seringkali, perkembangan UMKM lebih lambat dari perusahaan. Hal ini disebabkan oleh belum terselesaikan berbagai masalah tradisional yang terus berulang, seperti isu sumber daya manusia yang lemah, pembiayaan, pemasaran, dan masalah lainnya terkait pengelolaan usaha (Abor & Quartey, 2010).

UMKM memiliki peran dalam membangun ekonomi nasional. Keberadaan UMKM dapat membuat lapangan pekerjaan di desa yang masih kecil. Selain itu, UMKM juga memiliki kontribusi dalam menyebarkan hasil-hasil bumi ke daerah terpencil (Hadi & Prasetyo, 2015). Semenjak Pandemi, mayoritas UMKM menerapkan IPTEK sebagai penunjang bisnisnya, yaitu sejumlah 83,8%. Tantangan UMKM tidak hanya bersumber pada penerapan digitalisasi dan digital marketing saja, namun masalah akses permodalan, tepatnya sebanyak 69,5% belum terdistribusikan sesuai data Bank Indonesia. Hal ini dapat bersumber dari literasi keuangan dan inklusi keuangan dimana UMKM belum menjangkau lembaga keuangan. Susahnya memperoleh biaya usaha dapat mempengaruhi keberhasilan UMKM (Syarifah, 2019).

Problematika ini ditanggulangi melalui *financial inclusion program*. Program ini ditujukan guna pemerataan aksesibilitas layanan perbankan bagi publik (Hannig & Jansen, 2010). Pesatnya perkembangan teknologi dan internet telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan, yang kemudian memunculkan financial technology (fintech). Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017, teknologi keuangan adalah penerapan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan layanan, produk, teknologi, juga model usaha baru yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran, serta stabilitas moneter (Bank Indonesia, 2017). Inovasi dalam teknologi keuangan membawa beragam solusi keuangan, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah yang ingin maju. Perkembangan ini bertujuan untuk membuat layanan keuangan lebih inklusif.

Penggunaan dompet digital dan aplikasi keuangan digital dapat membuat alur pembayaran UMKM menjadi lugas dan hemat dari sebelumnya yang diperlukan untuk tugas-tugas manual.

Laporan Pemberdayaan UMKM 2022 mengungkapkan bahwa masalah yang dialami UMKM mengenai pemakaian teknologi keuangan meliputi kesulitan memperoleh akses internet, terbatasnya perangkat keras ponsel dan laptop, serta pengetahuan digital dan keterampilan yang kurang di kalangan pemilik UMKM dan karyawannya khususnya pada wilayah pedesaan. Faktor-faktor ini menyulitkan mereka dalam memanfaatkan teknologi secara efisien. (Mawarsari, 2023). Selain itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan terdapat kesenjangan sebesar 8,3% antara literasi keuangan dan inklusi keuangan pada *platform financial technology*. Hal ini menandakan bahwa sebagai individu sudah mengetahui layanan *fintech* namun memerlukan lebih banyak kemampuan dan sarana untuk mengaksesnya.

Kontribusi besar UMKM di Indonesia masih belum konsisten dengan permasalahan sumber daya manusianya sendiri dan bagaimana sumber daya manusia atau pelaku UMKM menggunakan perkembangan dunia keuangan untuk mengembangkan usaha mereka sendiri. Salah satu faktor pertama yang dapat mencirikannya, yaitu literasi keuangan (*financial literacy*). Konstituen ini merujuk pada kognisi tiap individu dalam mengorganisir efektivitas finansialnya untuk meningkatkan kesejahteraan usaha (Daud dkk., 2023), serta kinerja finansialnya (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021). Bagi pelaku UMKM, konstituen ini menjadi sangat penting dimana dapat meningkatkan pelaku UMKM dalam melakukan pengelolaan keuangan, sehingga hal ini mampu mendongkrak kinerja keuangan dari UMKM tersebut. Indeks literasi dan Inklusi keuangan Bali diatas SNLK

nasional, tepatnya 57,66% dan 92,21% (SNLIK, 2022). Dewa Made Indra selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bali, berpendapat bahwa inklusi keuangan di Bali masih belum mencapai tingkat optimal. Salah satu penyebabnya adalah definitnya layanan situs web kurbali.com, Hal ini terbukti dengan tingginya indeks inklusinya mencapai 92,21% yang belum banyak menjangkau UMKM.

Menurut POJK No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016, inklusi keuangan yaitu tersedianya akses ke lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan keperluan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraannya (OJK, 2016). Setelah krisis tahun 2008, inklusi keuangan menjadi tren karena dampak krisis tersebut sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat dengan pendapatan tidak teratur, yang tinggal di daerah terpencil, penyandang disabilitas, buruh tanpa dokumen legal, dan masyarakat pinggir. Kelompok-kelompok ini umumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan karena kendala biaya dan persyaratan yang ketat (Bank Indonesia, 2017). Secara keseluruhan, program inklusi keuangan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Irmawati et al., 2013). Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta unit. Namun, Kemenkop telah memiliki data bahwasannya 9,08 juta unit UMKM yang lengkap dengan nama dan alamat pemiliknya dalam Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) dan dari jumlah tersebut hanya 340.837 yang telah memiliki NIB atau sekitar 5,8%. Hal inilah yang menjadikan akses keuangan dan permodalan UMKM menjadi terkendala.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang krusial dalam perekonomian suatu negara. Kinerja UMKM tidak hanya tercermin dalam

kontribusi mereka terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dalam penyediaan produk dan layanan yang inovatif serta beragam bagi masyarakat. UMKM sering kali menjadi tulang punggung ekonomi lokal, membantu mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mendukung inklusi sosial ekonomi. Selain itu, keberadaan UMKM dapat memperkuat kedaulatan ekonomi suatu negara dengan meminimalkan ketergantungan pada impor. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti akses terbatas terhadap modal dan teknologi, serta persaingan yang ketat, UMKM tetap mampu bertahan dan tumbuh melalui berbagai upaya, seperti pelatihan keterampilan, akses terhadap pasar yang lebih luas melalui platform digital, dan dukungan kebijakan yang memadai. Dengan demikian, kinerja UMKM tidak hanya mencerminkan keberhasilan sektor bisnis kecil, tetapi juga menjadi indikator vital bagi keberlanjutan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesatnya perkembangan UMKM juga berakibat pada kesiapan bersaing UMKM dengan UMKM lainnya (Wardhana, 2022).

Kinerja usaha adalah evaluasi yang dilakukan melalui berbagai ukuran tertentu untuk menilai sejauh mana suatu usaha berhasil dalam menghasilkan laba (Kusumadewi, 2017). Kinerja UMKM memiliki hubungan yang erat dengan *financial literacy* dan *financial inclusion*. *Financial literacy* berarti tafsiran konseptual manajemen finansial maupun risiko, sangat penting bagi pemilik UMKM untuk mengelola keuangan mereka dengan baik. Selain itu, *financial inclusion* juga memiliki posisi substansial dengan memastikan akses yang adil dan setara terhadap layanannya, seperti pinjaman, rekening bank, dan asuransi dengan lebih mudah dan terjangkau.

Pariwisata Pulau Bali telah dikenal di seluruh dunia. Tidak hanya itu adat istiadat yang kental dan potensi sumber daya alamnya mendorong masyarakat Bali untuk mencari nafkah dengan menjalankan bisnis kecil atau UMKM. Berdasarkan data keragaan UMKM Bali Tahun 2023 jumlah UMKM di Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Kuantitas UMKM se-Bali**

Kabupaten/Kota	Jumlah	
	2021	2022
Kab. Bangli	44.175	44.251
Kab. Buleleng	57.216	66.368
Kab. Gianyar	75.620	75.666
Kab. Jembrana	66.537	67.183
Kab. Karangasem	50.717	50.717
Kab. Klungkung	36.072	35.792
Kab. Tabanan	47.160	47.957
Kab. Badung	40.989	25.174
Kota Denpasar	32.226	29.749

(Sumber: Data Keragaan Provinsi Bali, 2023)

Dapat dicermati pada tabel 1.1 penyebaran UMKM yang ada di Bali tidak merata. Hampir seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Bali mengalami peningkatan pertumbuhan UMKM, kecuali 2 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar. Kabupaten Badung menjadi salah satu Kabupaten yang mengalami penurunan UMKM yang sangat drastis.

**Tabel 1.2 Perkembangan Kuantitas UMKM Badung 2018 -2022**

No	Jenis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mikro	14,744	15,536	18,643	39.540		23.017
2	Kecil	2.834	3.093	3.348	1.299		3.665
3	Menengah	579	652	656	150		490
	<b>Total</b>	<b>18.157</b>	<b>19.281</b>	<b>22.647</b>	<b>40.989</b>	<b>25.174</b>	<b>27.162</b>

(Sumber: Diskop Kabupaten Badung, 2023)

Berdasarkan tabel 2. Perkembangan jumlah UMKM dari tahun 2018, 2016, 2020 mengalami peningkatan yang stabil, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 40.989 unit UMKM yang awalnya hanya berjumlah 22.647 unit pada tahun 2020. Namun, pada akhir Desember tahun 2021 Jumlah UMKM di Kabupaten Badung sebanyak 40.989 unit menurun menjadi 25.174 pada akhir Desember 2022. Hal ini menjadi suatu fenomena dimana adanya penurunan yang cukup signifikan dari UMKM di Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwasannya kinerja UMKM yang tidak baik. Rendahnya literasi keuangan dan jangkauan terhadap akses permodalan menyebabkan masalah finansial yang menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik sehingga menyebabkan kebangkrutan dalam usaha. UMKM sektor perdagangan menjadi sampel riset ini. Alasan memilih pelaku usaha perdagangan pada penelitian ini adalah; pelaku usaha perdagangan adalah kelompok yang sangat berpengaruh dalam ekonomi. Pelaku usaha perdagangan adalah usaha yang paling mudah dibuka dan ditutup karena modal yang dibutuhkan tidak sebesar yang lainnya. Terakhir, usaha perdagangan memiliki kalangan konsumen yang sangat luas. Sektor perdagangan memberikan pengaruh yang signifikan, khususnya terhadap PDB (Hanim & Noorman, 2018). Sehingga, usaha perdagangan sangat tepat dijadikan sampel untuk meneliti literasi keuangan sebagai kemampuan usaha mikro dalam mengelola keuangan dan *financial technology* serta inklusi keuangan sebagai variabel yang mempengaruhi dari Kinerja UMKM khususnya usaha mikro.

Teori yang dipakai pada riset ini yaitu teori berbasis sumber daya. Konseptual ini menyatakan bahwa suatu bisnis akan dapat memenangkan persaingan dan mencapai kinerja keuangan yang maksimal apabila memanfaatkan sumber daya

baik yang berwujud maupun tak kasat mata (Yasrawan et al., 2023). Terdapat tiga macam sumber daya bisnis perusahaan yakni sumber daya modal fisik, sumber daya modal manusia, dan sumber daya modal organisasi (Barney, 1991). Oleh karena itu, sumber daya perusahaan termasuk UMKM dapat dikatakan terdiri dari literasi keuangan serta inklusi keuangan yang termasuk bagian sumber daya modal fisik

Pada UMKM, literasi keuangan meningkatkan pengetahuan dalam mengelola uang dan memberikan akses yang mendukung perkembangan usaha. Sejalan dengan hal ini, literasi keuangan sering dianggap penting dalam meningkatkan kemampuan untuk mengakses produk yang sesuai dengan kebutuhan (Deka, 2015). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Wulandari (2019), Suardana (2020), Ruli et al. (2021) menyatakan bahwasannya *financial literacy* mengimplikasi *UMKM's financial performance*. Sementara riset yang dilakukan Pradipta (2022) memperoleh kinerja keuangan tidak dipengaruhi literasi keuangan. Sehingga masih adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya sehingga masih sangat diperlukan penelitian sejenis.

Inklusi keuangan muncul untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh UMKM dalam mendapatkan akses layanan keuangan. Inklusi keuangan memiliki peran mengatasi kesulitan tersebut, didukung oleh infrastruktur yang tersedia (Yanti, 2019). Berdasarkan *resource based theory* menyebutkan jika kinerja jangka panjang perusahaan akan dipengaruhi oleh sumber daya perusahaan yang baik. Salah satunya yaitu perkembangan inklusi keuangan. Beragam layanannya memudahkan publik, termasuk pelaku UMKM dalam memilih komoditas sesuai dengan kebutuhan usaha mereka (Worang et al., 2024). Sehingga dengan inklusi keuangan yang baik maka diharapkan mampu mendorong kinerja UMKM semakin

baik. Berdasarkan hasil penelitian Worang et al. (2024) menyatakan bahwasannya pelaku UMKM sangat familiar dengan program inklusi keuangan dan dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dengan efektif. Hidayatulloh (2020), Maharani (2022), Wardhana (2022) menyatakan bahwasannya MSMEs *financial performance* terimplikasi oleh *financial inclusion*. Namun penelitian Jumady dkk (2022) menyatakan kinerja tersebut tidak terimplikasi oleh *financial inclusion*. Riset oleh Ruli et al. (2021) menunjukkan apabila konstituen ini tidak berdampak pada kinerjanya maupun keberlangsungan UMKM. Masih banyak UMKM yang mengalami kendala untuk mengembangkan usahanya diakibatkan oleh terbatasnya permodalan (Akhiar, 2021).

Dalam upaya meningkatkan kinerja UMKM, penggunaan *financial technology* secara terus menerus digiatkan oleh berbagai pihak. *Financial technology* digunakan untuk membantu perusahaan, pemilik bisnis, dan konsumen untuk melakukan layanan keuangan dengan menggunakan perangkat lunak seperti komputer dan *smartphone* (Investopedia, 2019). *Fintech* atau *Financial technology* merupakan alat atau teknologi untuk mempermudah proses transaksi antara pembeli dan penjual serta dapat mengurangi celah 4 kecurangan dalam proses transaksi. Penggunaan teknologi keuangan ini menjadikan layanan keuangan semakin mudah dan efisien. *Financial technology* memberikan kemudahan kepada masyarakat karena lebih efisien dan dapat mengalokasikan modal atau dana kepada semua pihak, dalam jumlah berapapun, efektif, dan transparan serta tingkat suku bunga yang ringan (Pernando, 2016). Jenis-jenis *financial technology* layanan keuangan berbasis digital yang hingga saat ini berkembang di Indonesia dibedakan sebagai berikut seperti *Payment Chanel/System*, *Digital Banking*, *Online/Digital Insecure*,

*Lending Peer to Peer (P2P)* dan *Crowdfunding* (Siregar, 2016). Pada penelitian ini fokus dari *financial technology* yang digunakan adalah *Payment Chanel/System*, contohnya pembayaran digital seperti QRIS, Ovo, Gopay, Dana, Shopeepay dan sejenisnya serta menggunakan layanan perbankan secara digital seperti *M-Banking*, transfer uang melalui aplikasi dan sejenisnya. Pembayaran digital merupakan jenis *financial technology* yang paling banyak digunakan Masyarakat Indonesia. Dilansir dari DataIndonesia.id, *financial technology* pembayaran digital juga menjadi yang paling sering dipakai oleh masyarakat Indonesia. Layanan ini menjangkau 93,81 persen responden pada tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Badung, didapatkan informasi bahwa ada beberapa usaha yang sudah menerapkan *financial technology* berupa *paymet gateway* untuk keberlangsungan usahanya karena dirasakan kemudahan dalam bertransaksi dengan konsumen dan kemudahan dalam mengelola keuangan, namun adapula yang masih belum memahami penerapan *financial technology* secara utuh, sehingga lebih memilih secara manual dalam pencatatan penjualannya. Merujuk pada penjabaran permasalahan diatas *financial technology* menjadi variabel yang menarik untuk dilihat peranannya terhadap kinerja UMKM. Dalam penelitian milik oleh Lestari dkk (2020) dan Syarifah (2019), Prastika (2019) yang menyatakan bahwasannya *financial technology* mempengaruhi kinerja dari UMKM.

*Research gap* penelitian ini yaitu adanya perbedaan hasil beberapa penelitian yang serupa, terutama dengan kontradiksi kondisinya secara aktual. Selain itu, kebaruan riset terletak pada pengimplementasian *fintech* yang masih jarang dipakai. Divergensi riset ini juga terletak di lokasi, populasi, serta sampelnya. Pengkaji

memilih Kabupaten Badung sebagai lokasi riset, yang jarang dijadikan objek penelitian mengenai kinerja UMKM, serta didasarkan pada fenomena yang terjadi di daerah tersebut.

Sesuai problematika tersebut, peneliti melakukan kajian yang berjudul **“Pengaruh *Financial Technology*, Literasi Keuangan, dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Badung)”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berikut adalah beberapa persoalan yang teridentifikasi:

1. Kuantitas UMKM Kabupaten Badung mengalami penurunan yang drastis pada akhir tahun 2021 ke akhir tahun 2022 dengan jumlah awal 40.989 menjadi 25.174. Artinya menunjukkan pertumbuhan dan kinerja UMKM yang kurang baik.
2. Kesenjangan sebesar 8,3% antara literasi keuangan dan inklusi keuangan pada *financial technology*. Hal ini menandakan bahwa sebagian individu sudah mengetahui layanan *financial technology* namun memerlukan lebih banyak kemampuan dan sarana untuk mengaksesnya. Pelaku UMKM masih sulit untuk menerapkan *financial technology* karena minimnya pengetahuan mereka terkait *financial technology* sehingga sulit untuk mengimplementasikannya di dalam kegiatan usaha.
3. Sejumlah 69,5% UMKM di Kabupaten Badung belum memperoleh pinjaman. Hal ini dapat disebabkan oleh literasi keuangan dan inklusi keuangan dimana UMKM belum menjangkau lembaga keuangan.

4. Dewa Made Indra selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bali menyebutkan belum maksimalnya *financial inclusion* Bali karena terpakunya aksesibilitas public pada *website* kurbali.com.
5. Sejumlah 9,08 juta unit UMKM yang lengkap dengan nama dan alamat pemiliknya dalam Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) dan dari jumlah tersebut hanya 340.837 yang telah memiliki NIB atau sekitar 5,8%. Hal inilah yang menjadikan akses keuangan dan permodalan UMKM menjadi terkendala.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Tujuan pembatasan masalah yaitu agar permasalahan yang diteliti tidak melebar atau meluas sehingga pada riset ini masalah hanya dibatasi pada *financial technology*, literasi dan inklusi keuangan, serta kinerja UMKM.

### 1.4 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *financial technology* terhadap kinerja UMKM?
2. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM?
3. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berikut ini beberapa tujuannya:

1. Untuk menganalisis pengaruh *financial technology* terhadap Kinerja UMKM.

2. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap Kinerja UMKM.
3. Untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap Kinerja UMKM.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Temuan riset bisa menjadi tambahan wawasan maupun pertimbangan pengkaji di masa mendatang.
2. Pengembangan *resource-based theory* dan sebagai referensi dalam beberapa mata kuliah di Fakultas Ekonomi, khususnya jurusan ekonomi dan akuntansi dalam beberapa mata kuliah seperti Akuntansi Koperasi dan UMKM, Kewirausahaan, Akuntansi Keuangan, dan Investasi dan Pasar Modal.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Pemerintah Kabupaten Badung**

Temuan riset diharapkan menjadi referensi bagi Pemerintah Badung ketika merumuskan strategi guna memaksimalkan kapasitas usaha ini.

#### **2. Bagi Pelaku UMKM**

Temuan riset bisa sebagai dasar pertimbangan saat mengeskalasi efektivitas dan efisiensi kerja dari UMKM sehingga dapat meningkatkan kinerja UMKM.

#### **3. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa dan sebagai sumber referensi khususnya dalam mata kuliah Pengantar Bisnis, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Keuangan, Investasi dan Pasar Modal, serta Kewirausahaan.